



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 20 Februari 2017

Halaman: 2

BERI SINYAL LANJUTKAN GUGATAN KE MK

PDIP Kini Desak Pemilihan Ulang

YOGYA (KR) - PDIP Kota Yogya masih mempersoalkan jumlah surat suara yang tidak sah dalam ajang Pilwali. Partai pengusung Imam-Fadli itu pun akan kembali meminta pembukaan kotak suara tidak sah dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kota Yogya. Jika permohonan itu tidak dikabulkan, pihaknya bakal mendesak ada pemilihan ulang.

"Ini bukan persoalan menang atau kalah, tapi menjaga konstitusi. Ada sekitar empat belas ribu surat suara yang dikategorikan tidak sah. Itu cukup tinggi, dan siapa yang berani menanggung jika ternyata itu merupakan suara sah namun dinyatakan tidak sah," tandas Ketua DPC PDIP Kota Yogya, Danang Rudyatmoko, dalam jumpa pers Minggu (19/2).

Permohonan serupa untuk membuka kotak surat suara tidak sah juga sudah ia sampaikan saat proses rekapitulasi di jenjang kecamatan. Namun kala itu hanya dilakukan di TPS tertentu di Kecamatan Umbulharjo, Kotagede dan Ngampilan. Setelahnya, saksi yang mendapat mandat dari pasangan Imam-Fadli menyampaikan nota keberatan.

Danang menambahkan, tingginya jumlah surat suara tidak sah pada pemilihan di wilayah Kota Yogya dinilai cukup janggal. Bahkan, kemarin pihaknya langsung mengumpulkan seluruh saksi yang sudah diterangkan di tiap TPS serta kecamatan guna mengidentifikasi ulang dugaan pelanggaran. "Kami masih berkeyakinan ada kecurangan yang sistemik, dan ini akan terus kami lawan demi konstitusi," imbuhnya.

Oleh karena itu, jika dalam rekapitulasi di tingkat KPU Kota Yogya masih tidak bisa membuka kotak suara tidak sah, maka usulan pemilihan ulang menjadi opsi lanjutan. Saat itu juga, pihaknya akan melayangkan aduan ke Panwas, Bawaslu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai bagian dari upaya gugatan.

Bahkan, pihaknya memberikan sinyal akan melanjutkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, beberapa bukti untuk menyampaikan gugatan tersebut juga telah ia susun. "Sekali lagi bukan untuk mengejar kemenangan, tapi edukasi. Surat suara yang tidak sah itu sebenarnya seperti apa, kan tidak tahu jika kotaknya tidak dibuka. Bisa jadi nanti ke MK tapi

prosedurnya kami lalu dulu dari bawah," jelasnya.

Anggota Tim Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP Ari Surya juga menyampaikan demikian. Pihaknya sudah mengumpulkan bukti dugaan pelanggaran saat masa kampanye, hari tenang, pemungutan suara hingga rekapitulasi berjenjang. "Kami berharap KPU Kota Yogya mampu menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak diakomodir, maka kami akan gunakan hak hukum," katanya. (Dht)-m

Danang Rudyatmoko (kiri) saat memberikan pemaparan, kemarin.

KR-Ardhi Wahdan

**-KPU Kota Yogya
-Panwas kot
B. Netral
Biasa**

Sifat	Tindak Lanjut
Amat Segera	☐ Untuk D
Segera	☐ Untuk D
Biasa	☐ Jumpa P

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Plt. Kepala Sekretaris

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005